

EFEKTIVITAS PERMENTAN NOMOR 10 TAHUN 2022 DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATENTANAH LAUT

Rachmat Hidayat¹, Nurul Listiyani, S.H.,M.H², Rakhmat Nopliardy, S.H.,M.H³

Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 19810005

Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 1104127303

Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 1124116602

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

BANJARMASIN

E-Mail : rh081944534631@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan petani, untuk membantu petani pemerintah menyediakan subsidi pupuk sehingga dapat meringankan petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, agar semua petani terutama petani menengah ke bawah dapat mengakses pupuk tersebut. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang dalam pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah dengan mekanisme dan pengawasan tertentu.

Implementasi kebijakan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi menghadirkan beberapa permasalahan. Masalah yang terjadi yaitu kesulitan mendapatkan pupuk karena langka, fluktuasi harga, dan penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani sering kali melebihi takaran.

Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan efektivitasnya di Kabupaten Tanah Laut dan Faktor-Faktor penyalahgunaan dan alokasi Pupuk Subsidinya.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Kepala Seksi Pupuk, Ketua Kelompok Tani, dan Petani mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi di Kabupaten Tanah Laut. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.

Kata Kunci : Pupuk Subsidi, Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Efektivitas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana
- Adisasmita. (2011). Pengelolaan, Pendapatan, & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad Tanzeh, (2009). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras.
- Alimoeso, Sutarto. (2010). Majalah Pangan, Vol. 19 No. 1 Ketersediaan Pupuk 2010-2014 dan Subsidi Pupuk Maret 2010.
- Dahlan Thayib, dkk. (2017). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.
- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. (2013). Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Kementerian Pertanian.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Jakarta. Balai Pustaka
- Lingga dan Marsono. (2002). Petunjuk Penggunaan Pupuk. Jakarta: Penebar Swadaya
- M. Subana dan Sudrajat, (2001). Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia
- Ni'matul Huda. (2005). Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oteng Sutisna. (1983). Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional. Bandung: Angkasa
- Pertanian. (2018). Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1984). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. (2008). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. (2012). Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka pembangunan Indonesia Penerbit UI Perss Jakarta
- Zainuddin Ali. (2015). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Aditama, Ageng. (2015). Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015). Skripsi Universitas Lampung.
- Afdhol Ilhamsyah dan Irawansyah. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabuoaten Sumbawa Tahun 2021. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 1(1)
- Ashari, M. Latifa, dan D. Hariani. (2018). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Adminitasi Publik 53 (9).
- Aslina, Abdul K dan S Djuliaty. (2016). Kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pendistribusian Pupuk dan Pestisida Di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No 2.
- Hajan Karundeng. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pohuwatu. Jurnal Administro. 4(2).
- Leni Sismayanti. (2021). Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Tingkat Pengecer. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Moko, K.W., Suwanto, dan B.W. Utami. 2018. Perbedaan Persepsi Petani terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture 32 (1): 9.

Website

Kajian kerjasama antara PKAPBN-BKF dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/German International Cooperation (GIZ).
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 4 April 2023 jam 14:56 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Kementerian Pertanian

Menperindag No.70 Tahun 2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pertaturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian..